

EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN PEREMPUAN PERTAMA SEBAGAI PEJABAT POLITIK LEVEL TERTINGGI DI KABUPATEN BIMA

Muhamadong¹, Hendra², Salahuddin³, Firliah Rizkiani⁴

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima
Email : muhamadong@stisipmbojobima.ac.id

ABSTRAK

Sebagai seorang perempuan yang memimpin Kabupaten Bima, seorang Bupati Kabupaten Bima menjadi motor penggerak bagi masyarakatnya untuk terlibat aktif dalam pembangunan di Daerah. Untuk itu, kepemimpinan penting adanya guna membangun partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tim peneliti melihat di Kabupaten Bima – NTB bahwa perempuan yang menjadi sosok pemimpin (pejabat) politik merupakan hal yang langka, terlebih lagi menjadi seorang Bupati yang beberapa waktu memenangkan PILKADA. Kabupaten Bima ". Rumusan masalah dalam penelitian yaitu ; Bagaimana Kesuksesan Kepemimpinan Hj. Dinda Dhamayanti Putri, SE Sebagai Bupati Bima ? **Metode penelitian** menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data penelitian antara lain: observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Kemudian teknik analisa data dengan menggunakan reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan (verifikasi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bima telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 13 sasaran yang mencakup 35 indikator sasaran, diketahui bahwa 11 indikator sasaran atau 31,43 % Sangat Berhasil, 23 indikator sasaran atau 65,71 % Berhasil, 1 indikator sasaran atau 2,86 % cukup berhasil. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 110,87 % atau bermakna **Sangat Berhasil**. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bima pada tahun 2019 **Sangat Berhasil**.

Kata kunci : Efektifitas Kepemimpinan, politik, perempuan

PENDAHULUAN

Kepemimpinan perempuan dalam bidang politik menjadi isu yang selalu diperbincangkan dan memancing polemik perdebatan antara yang pro dan yang kontra tentang kepemimpinan perempuan dalam sebuah negara. Stigma bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi – tinggi adalah upaya pembodohan dan mengekang demokrasi yang tumbuh dan berkembang di

Indonesia, oleh karena itu tidak hanya yang memiliki kesempatan yang besar untuk menjadi seorang pemimpin adalah kaum lelaki. Kendati demikian kenyataannya banyak juga perempuan yang menjadi pemenang dalam pemilihan kepala daerah, seperti halnya Walikota Surabaya, Bupati Bima dan beberapa daerah lain di Indonesia yang mana kepala daerahnya adalah seorang perempuan. Otonomi Daerah

memberikan peluang yang sangat besar bagi pemerintah daerah dalam rangka menata diri dan membangun daerahnya dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di wilayahnya, tanpa harus melihat apakah pemimpin itu laki - laki ataupun Perempuan. Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu perempuan dalam pembangunan harusnya ada keseimbangan yang tersebar secara merata dari seluruh wilayah Republik Indonesia agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai pemimpin tidak ada peraturan perundang - undangan yang melarang perempuan menjadi Bupati, Walikota, Gubernur, dan bahkan Presiden, asal perempuan tersebut memiliki kemampuan menjadi motor penggerak bagi masyarakatnya untuk terlibat aktif dalam pembangunan yang ada di setiap tingkatan. Untuk itu kepemimpinannya penting adanya guna membangun partisipasi masyarakat perempuan dalam pembangunan dan bukan hanya sebagai pelengkap terhadap laki-laki. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan ditingkat daerah merupakan realisasi dan implikasi pembangunan sumber daya manusia secara nasional. Untuk menunjang pembangunan di tingkat daerah peran-serta perempuan yang mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah dan sebagai Kepala Pemerintahan di setiap tingkatannya harus diberi ruang yang sama dengan kaum laki - laki. Oleh karenanya, efektivitas Kepemimpinan Kepala

Daerah untuk mengawal hal tersebut menjadi sangat penting dan mutlak dibutuhkan terlepas pemimpinnya perempuan atau laki-laki. Apalagi Otonomi daerah memberikan harapan bagi Daerah agar mampu berinisiatif, berkeaktifitas dalam menggali seluruh potensi yang ada guna untuk kesejahteraan masyarakat dengan melibatkannya dalam proses pembangunan agar dapat tumbuh dan berkembang. Peran-serta masyarakat perempuan untuk berpartisipasi di dalamnya sudah sangat besar.

Keikutsertaan perempuan dalam pembangunan adalah kesadaran yang tidak muncul dengan sendirinya. Kesadaran tersebut harus dibimbing dan diarahkan sampai mereka bisa mencapai kemandiriannya. Dengan adanya keterlibatan perempuan secara mental dan emosional masyarakat mulai berpikir bahwa perempuan Indonesia pada hakekatnya memiliki kemampuan dalam memimpin, mulai dari keterlibatannya dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, tanggung jawab sampai pemanfaatan pembangunan akan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana perubahannya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah memberikan ruang yang besar agar terwujudnya pembangunan di tingkat daerah yang lebih baik dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki. Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan. Oleh karena

itu, suksesnya pembangunan di daerah salah satunya ditentukan oleh kualitas kinerja pemerintahan dan sejauhmana efektivitas kepemimpinan kepala Daerah dalam mengawal pembangunan dan sejauhmana partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan berlangsung. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1).Bagaimana Efektifitas Kepemimpinan Perempuan Sebagai Pejabat Politik Level Tertinggi di Kabupaten Bima ? 2).Bagaimana Pengaruh Kepemimpinan Perempuan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kabupaten Bima?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *mixer method* yakni gabungan deskriptif kualitatif dan kuantitatif guna mengungkapkan kebenaran dan fakta yang terjadi dilapangan. Penelitian ini Bertempat di Kabupaten Bima NTB. Teknik Penentuan Informan menggunakan purposive sampling, Informan dalam penelitian ini meliputi Anggota DPRD Kabupaten Bima; Tokoh Pendidikan, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah); Tokoh Masyarakat. Penelitian ini memerlukan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga macam cara yaitu : observasi partisipatif, wawancara tak terstruktur dan studi dokumentasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan di antaranya: 1). Reduksi Data 2). Display Data 3). Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bima memiliki luas wilayah daratan sebesar 438.940 Ha atau 4.389,40 Km² dan luas wilayah perairan laut seluas 3.760,33 Km²dengan panjang garis pantai sebesar 687,43 Km². Proporsi luas perairan laut Kabupaten Bima 37,7 Km², dari luas wilayah perairan laut Pulau Sumbawa 9.970,96 Km² atau 29.26% dari luas wilayah perairan laut Propinsi Nusa Tenggara Barat 12.852,14 Km². Batas administrasi wilayahnya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Laut Flores
2. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia.
3. Sebelah Timur : Selat Sape
4. Sebelah Barat : Kabupaten Dompu.

Secara administrasi Kabupaten Bima terbagi atas 18 kecamatan, 191 desa, 782 Dusun, 1.048 Rukun Warga (RW) dan 2.475 Rukun Tetangga (RT), dengan wilayah Kecamatan terluas adalah Kecamatan Tambora dengan luas 62.782 ha atau sebesar 14,30%, sedangkan kecamatan yang terkecil wilayahnya adalah Kecamatan Belo dengan luas wilayah sebesar 4.476 ha atau 1,02% dari luas wilayah Kabupaten Bima. Namun demikian, Kecamatan yang paling banyak desanya yaitu Kecamatan Sape dengan jumlah desa sebanyak 18 desa, sedangkan yang paling sedikit desanya yaitu Kecamatan Parado dengan jumlah desa sebanyak 5 desa, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Dusun di Kabupaten Bima Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah			
			Desa	Dusun	RT	RW
1	Monta	22.752	14	45	162	68
2	Parado	26.129	5	18	61	23
3	Madapangga	23.758	11	41	147	44
4	Woha	10.557	15	63	173	80
5	Belo	4.476	9	33	119	50
6	Langgudu	32.294	15	59	168	76
7	Wawo	13.229	9	30	119	48
8	Sape	23.212	18	70	255	117
9	Lambu	40.425	14	40	180	82
10	Wera	46.532	14	82	224	103
11	Ambalawi	18.065	6	38	122	45
12	Donggo	12.383	9	46	125	49
13	Sanggar	47.789	6	22	59	26
14	Tambora	62.782	7	24	54	25
15	Bolo	6.693	14	71	180	73
16	Soromandi	34.166	7	52	134	61
17	Lambitu	6.540	6	15	42	17
18	Palibelo	7.158	12	33	151	61
	Jumlah	438.940	191	782	2475	1.048

Data : Pembangunan Kabupaten Bima Dalam Angka 2018

Topografi

Bentuk topografi wilayah Kabupaten Bima bervariasi dari datar sampai agak curam dengan

Lereng 0-2%, bentuk wilayah datar, seluas 41.086 Ha (8,62%).

Lereng 2-8%, bentuk wilayah agak landai, seluas 96.712 Ha (20,30%).

Lereng 8-15%, bentuk wilayah bergelombang, seluas 174.242 Ha

(36,57%).

Lereng 15-25%, bentuk wilayah curam, seluas 164.391 Ha (34,50%).

Jumlah penduduk Kabupaten Bima berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima pada tahun 2018 adalah sebesar 528.993 jiwa yang terdiri dari laki-laki 266.736 jiwa dan perempuan 262.257 jiwa.

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tiap Kecamatan Kabupaten Bima Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah
		L	P	
1	MONTA	19.987	19.989	39.976
.				
2	BOLO	26.429	26.385	52.814
.				
3	WOHA	26.728	25.936	52.664
.				
4	BELO	14.039	14.070	28.109
.				
5	WAWO	9.752	9.803	19.555
.				
6.	SAPE	32.564	31.540	64.104
7.	WERA	16.972	16.518	33.490
8.	DONGGO	10.281	10.257	20.583
9.	SANGGAR	6.871	6.709	13.580
10	AMBALAWI	11.095	10.610	21.705
.				
11	LANGGUDU	16.393	16.292	32.685
.				
12	LAMBU	21.513	21.047	42.560
.				
13	MADAPANGGA	16.089	16.144	32.233
.				
14	TAMBORA	4.473	4.192	8.665
.				
15	SOROMANDI	9.632	9.332	18.964
.				
16	PARADO	5.666	5.514	11.180
.				
17	LAMBITU	3.295	3.158	6.453
.				
18	PALIBELO	14.957	14.761	29.718
.				
	TOTAL	266.736	262.257	528.993

Data:Dinas Dukcapil Kab.Bima tahun 2019

Tabel 1.3. Penduduk Kabupaten Bima menurut Kelompok Usia Tahun 2018-2019

No.	Kelompok Usia (tahun)	Jumlah (jiwa)
1	0-4	30.581
2	5-9	42.616
3	10-14	52.652
4	15-19	53.018
5	20-24	47.104
6	25-29	43.711
7	30-34	43.315
8	35-39	38.124
9	40-44	34.495
10	45-49	30.552
11	50-54	24.998
12	55-59	21.004
13	60-64	16.599
14	65-69	12.040
15	0-74	7.082
15	> 75	31.102
	Jumlah	528.993

Data : Dinas Dukcapil Kab. Bima tahun 2019

Tabel. 1.4. Penduduk Kabupaten Bima Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah jiwa
1	Tidak/Belum Sekolah	113.733
2	Belum Tamat SD/Sederajat	75.164
3	Tamat SD/Sederajat	112.815
4	Tamat SMP/Sederajat	72.605
5	Tamat SMA/Sederajat	117.492
6	Diploma	4609
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	3.881
8	Diploma IV/Strata I	27.293
9	Strata II	671
10	Strata I II	100
	Jumlah	528.993

Data : Dinas Dukcapil Kab. Bima

Mata pencaharian masyarakat kabupaten bima lebih dominan pada pertanian dan perikanan dan peternakan dengan produk unggulannya adalah bawang merah,

Padi, Jagung, Umbi-umbian, kacang-kacangan, Madu, Ikan Segar Sapi, Kuda, Kerbau dan Kambing. Bahkan kabupaten Bima dikenal dengan Air Susu Kuda Liar dan Madu alam yang

manis. Dilihat dari ragam bentang daratan kabupaten Bima memiliki wilayah pegunungan yang tinggi nan hijau, tanah aluvial yang subur, mata air yang melimpah serta memiliki perairan laut yang luas baik disebelah timur berbatasan dengan laut flores dan disebelah selatan kabupaten bima merupakan Samudra Hindia dengan beragam kekayaan laut seperti Ikan, Penyu, Rajungan (Kepiting), Udang, Rumput Laut dan Mutiara. Dipantai-pantainya ada tumbuh tumbuhan hijau seperti bakau, manggrof, hamparan kebun kelapa yang luas disebelah timur kabupaten bima yakni Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu, kemudian hamparan kebun kelapa juga berada di sebelah selatan yakni dikecamatan Langgudu dan Kecamatan Monta. Kabupaten Bima juga merupakan kota pariwisata alam yang indah karena memiliki panorama alam yang indah, gunung tambora, dikecamatan Tamboro, Gunung Sangian dikecamatan Wera pantai-pantai panjang nan indah pasir putih, pasir berwarna pink (pantai pink), pantai Lariti, Pantai Ronto, pulau kambing di kecamatan Langgudu dan delta langgudu di ujung timur kecamatan Langgudu.

Efektifitas Kepemimpinan Perempuan Sebagai Pejabat Politik Level Tertinggi di Kabupaten Bima.

Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE. Selama 4 tahun terakhir kepemimpinannya apakah dapat menunjukkan prestasi yang gemilang dengan meletakkan dasar - dasar kebijakan pelayanan publik dan program - program yang selama ini dinilai terjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat Kabupaten Bima selama kepemimpinan beliau, suara yang terbanyak diseluruh kecamatan dan desa di Kabupaten

Bima. Mencapai 47 % mengatakan cukup sukses dari jumlah responden yang ada.

Terkait dengan kinerja dan prestasi yang telah dicapai oleh pemerintah daerah selama 4 tahun terakhir responden mengatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kinerja yang baik hal ini dikatakan oleh responden sebanyak 54 %. Sementara yang berkaitan dengan prestasi pemerintah daerah menerima “ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI ” Responden mengatakan sangat bagus sebanyak 67%, dan responden mengatakan bagus 33 %.

Dibidang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bima memperoleh penghargaan dari Kementerian PAN & RB Republik Indonesia dengan predikat B, ada peningkatan dari tahun 2017 dengan predikat C, penilaian ini mengandung makna bahwa pelaksanaan program baik penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan telah menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi yang dinilai bagus hal ini dikemukakan oleh responden sebanyak 60 % dari total responden.

Apakah selama kepemimpinan Dinda Dahlan memiliki inovasi terhadap pelayanan publik hal ini dinilai cukup berinovasi responden sebanyak 37,28 %. Kebijakan umum pemerintah kabupaten bima sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bima tahun 2018 yang lalu, responden sebanyak 78.03 %. Mengatakan sangat sesuai.

Terkait dengan indikator kinerja utama instansi pemerintah daerah

Kabupaten Bima dilaksanakan dengan sesuai arah kebijakan umum pemerintah daerah kabupaten bima? tanggapan responden dengan capaian indikator kinerja utama yang dilakukan oleh Bupati Bima dan wakil Bupati Bima responden sebanyak 58.23 % mengatakan sudah sesuai.

Untuk mengetahui alokasi anggaran APBD Kabupaten Bima tahun 2019 yang masuk dalam belanja rutin aparatur, serta bagaimana tingkat keberhasilan kepemimpinan Hj. Dinda Dhamayanti Putri. Tim peneliti melakukan wawancara dengan Anggota DPRD Kabupaten Bima Edy Mukhlis, S.Sos, dari fraksi partai Nasional Demokrasi (NASDEM). Edy Mukhlis mengatakan, APBD Kabupaten Bima banyak terserap pada pembiayaan dan belanja rutin aparatur selain pembiayaan pada bidang pembangunan. Jumlah pembiayaan dan belanja bidang pemerintahan sangat fantastis mengingat banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bima dan Tenaga Honorer Daerah, Belanja Administrasi Aparatur Sipil Negara dan ditambah dengan Belanja dan pembiayaan dan belanja rutin DPRD Kabupaten Bima serta belanja Administrasi SEKWAN Kabupaten Bima, tentu saja kebutuhan tersebut sangat besar dan harus dilaksanakan agar pelaksanaan tugas masing-masing dapat tercapai, oleh karena itu penggunaan anggaran APBD tahun 2019 untuk belanja rutin Aparatur mencapai ± 70 %.

Terkait dengan pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh Bupati Bima dalam 4 tahun terakhir, responden/informan sebanyak 69.12 % mengatakan sukses.

Pengaruh Kepemimpinan Perempuan Sebagai Pejabat Politik Terhadap Keberhasilan Pembangunan Di Kabupaten Bima.

Seiring dengan kemajuan kesetaraan gender, posisi teratas di bidang Pemerintahan dan perusahaan swasta kini tak lagi didominasi oleh pria. Sudah banyak wanita yang jadi pemimpin di dunia kerja. Istilah yang sering dipakai saat ini adalah *lady boss*. Pria dan wanita memang beda, sehingga dalam kepemimpinan pun mereka memiliki gaya dan pendekatan yang berbeda. Misalnya saja dalam kemampuan berkomunikasi yang dianggap lebih lincah dan juga mahir melakukan beberapa tugas sekaligus (*multitasking*).

Untuk menguraikan lebih rinci tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Bima, Bupati Bima telah menetapkan Peraturan Bupati Bima Nomor 42 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Bima, prestasi Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE. Selama 4 tahun terakhir kepemimpinannya dapat menunjukkan prestasi yang gemilang dengan meletakkan dasar - dasar kebijakan pelayanan publik, hal ini dikatakan oleh responden sebanyak 75,23 %.

Kemudian mengenai pembinaan aparatur birokrasi dan program-program pembangunan selama kepemimpinan Dinda Dahlan dinilai Sukses dalam membina Aparatur Birokrasinya hal ini sesuai dengan tanggapan responden sebanyak 85.31 %.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana indikator efisiensi

pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) oleh pemerintah Kabupaten Bima. Sebagaimana yang didapatkan dari jawaban responden/informan penelitian, bahwa indikator yang menunjukkan adanya efisiensi pemanfaatan sumber daya dan keselarasan program terhadap pencapaian sasaran terlihat dari pencapaian indikator kinerja daerah yang membaik. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 13 sasaran yang mencakup 35 indikator sasaran, diketahui bahwa 11 indikator sasaran atau 31,43 % Sangat Berhasil, 23 indikator sasaran atau 65,71 % Berhasil, 1 indikator sasaran atau 2,86 % cukup berhasil. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 110,87 % atau dapat dikatakan berhasil.

Sementara dari aspek inovasi daerah yang berhubungan dengan pelayanan publik khususnya bidang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bima dapat dikatakan belum sesuai harapan masyarakat. Di antaranya adalah program inovasi SI MAWAR dan program *MESSRA*, dinilai belum menunjukkan hasil yang maksimal, sebagaimana yang dikemukakan oleh responden menunjukkan angka 60% menyatakan belum sesuai harapan.

Terkait program inovasi pemerintah daerah tersebut, bahwa program inovasi Pemerintah Kabupaten Bima tentang program SIMAWAR dan *MESSRA*, pada masa kepemimpinan Dinda Dahlan, mayoritas informan memberikan jawaban tidak mengetahui tentang program Inovasi *MESSRA*, karena ketika mereka mengurus KTP, KK, Surat Pindah dan lain sebagainya tetap mendatangi Kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima. Begitupun dengan program SIMAWAR yang tergolong baru, sekitar 62% informan mengatakan belum mengerti. Kemudian di bidang ketertiban dan keamanan, selama kepemimpinan Dinda-Dahlan dinilai sangat baik sebagaimana yang terlihat pada meningkatnya ketertiban dan perlindungan masyarakat. Dari beberapa indikator menunjukkan pencapaian kinerja bidang ketertiban dan keamanan pada periode tahun 2016-2019 berada pada angka 81,67 %, dan mayoritas tanggapan responden memberikan penilaian sangat baik.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir masa pemerintahan Dinda - Dahlan, telah melakukan berbagai upaya untuk melepaskan Kabupaten Bima dari predikat sebagai zona merah, dengan melakukan koordinasi bersama pihak Pol PP, Kepolisian dan TNI. Pemerintah Kabupaten Bima terus memaksimalkan pembangunan dan mengajak seluruh tokoh agama untuk terus membimbing masyarakat menolak segala bentuk paham yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Selain memaksimalkan pembangunan, pemerintah juga melakukan berbagai pendekatan kultur dan serta memanfaatkan para tokoh - tokoh agama untuk Memberikan dakwah - dalwah secara terus menerus dan yang baik kepada seluruh masyarakat kabupaten bima. Adapun di bidang kesejahteraan rakyat, berdasarkan hasil wawancara yang dihimpun oleh tim peneliti, menunjukkan hasil yang sangat baik. Sebagaimana jawaban informan terkait pelayanan di bidang kesejahteraan rakyat, menjelaskan

bahwa terkait masalah kemiskinan dan pengangguran karena mayoritas informan yaitu sebanyak 65% memberikan jawaban sangat baik. Sejalan dengan hasil wawancara diatas, bahwa indikator untuk sasaran strategis menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, rata-rata menunjukkan capaian kinerja sasaran pada tahun 2019 sebesar 71,20 % atau Sangat Berhasil.

Program yang digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima dibagi ke dalam tiga klaster yakni : program perlindungan sosial, program pemberdayaan masyarakat dan program peningkatan pendapatan. Program tersebut tersebar pada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di antaranya pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, RSUD, DPMDes, BPPKAD, DP3AP2KB. Di samping itu juga akumulasi dari dampak peningkatan dana desa yang disalurkan Pemerintah Kabupaten Bima melalui APBD setiap tahunnya. Disamping indikator kemiskinan di atas, salah satu indikator yang menjadi penilaian kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia yang meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan indeks daya beli atau kemampuan ekonomi masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan : Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah sesuai arahan tata ruang, maka untuk sasaran strategis : Meningkatnya Aksesibilitas Sarana dan Prasarana Daerah, indikator telah melebihi target, dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun

2018 - 2019 sebesar 50,71 % atau Sangat Berhasil

Persentase wilayah yang terpasang jaringan listrik. Kebutuhan sebagian besar disediakan oleh PLN sebagai perusahaan milik negara yang bertugas untuk mengusahakan penyediaan tenaga listrik. Dari capaian sebesar 98,95% merupakan cakupan yang berasal dari PLN, atau dari 191 desa di wilayah Kabupaten Bima hanya ada 3 desa yang belum teraliri listrik PLN yaitu Desa Sarae Ruma, Riamau dan Desa Oi Katupa (PLTS) komunal pemerintah daerah Kabupaten Bima).

Persentase wilayah yang saling terhubung dengan moda transportasi.

Untuk indikator sasaran persentase wilayah yang saling terhubung dengan moda transportasi capaiannya sebesar 13,65 %, melebihi target (13,61%) dan dikategorikan sangat berhasil (100,29%). Luas wilayah kabupaten Bima yang terbagi dalam 18 Kecamatan dan 191 desa sudah terhubung oleh moda transportasi. Untuk desa / wilayah pesisir pada rentang waktu 2016 - 2019 telah dibangun sarana dan prasarana seperti :

- a. Tersedianya tambatan perahu di Kawinda Toi Kecamatan Tambora, Tambatan Perahu Desa Pundi Kecamatan Soromandi, Tambatan Perahu Desa Nipa Kecamatan Ambalawi dan Tambatan Perahu Desa Lambu Kecamatan Lambu serta Tambatan Perahu Desa Kore Kecamatan Sanggar dan Desa Sai Kecamatan Soromandi.
- b. Fasilitas perhubungan laut (1 Pos Pengawasan Laut Desa Soromandi, 3 Halte Tambatan Perahu Desa Darussalam dan 2 Buah Kapal Kayu dengan rute Rompo, Sarae Ruma,

Karampi dan Waduruka serta Bajo Pulau)

Persentase wilayah terhubung akses internet

Indikator wilayah yang terhubung akses internet menjadi penting dalam rangka menyebarkan informasi pembangunan baik yang merupakan konten berita ataupun postingan yang disebarluaskan melalui Website Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dengan situs www@bimakab.go.id ataupun melalui Facebook Diskominfo Kab. Bima. Website Pemda Kab. Bima sudah ada sejak Tahun 2016 namun Facebook Diskominfo baru ada sejak terbentuk Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Bima di awal Tahun 2018. Target berita yang disebarluaskan melalui website www@bimakab.go.id dan Facebook Diskominfo Kab. Bima, tahun 2018/2019 adalah 120 informasi per tahun dan terealisasi adalah sebanyak 160 informasi.

Target Capaian Dibandang Pertanian

Untuk Luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Bima adalah 57.994 Ha. Dari luasan tersebut, di tahun 2018 panjang jaringan irigasi 832.131 M' dengan kondisi yang berfungsi baik sepanjang 350, 23M' atau 42.09% dari total panjang irigasi, dan melewati target IKU sebesar 39.50%. indikator untuk sasaran strategis Terpenuhinya kebutuhan air irigasi, melebihi target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2019 sebesar 61,56 % atau Berhasil.

Pencapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh keselarasan sasaran dengan program utama yaitu: 1. Pengembangan, Pengelolaan,

dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, dengan kegiatan utama :

- a) Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- b) Normalisasi dan Perkuatan Tebing
- c) Peningkatan partisipatif pengelolaan sungai danau, dan sumber daya air lainnya
- d) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Irigasi
- e) Pembangunan / Peningkatan dan Rehabilitasi Daerah Irigasi
- f) Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber daya Air Lainnya

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Bila dibandingkan dengan rencana atau target RPJMD 2016 – 2021, Realisasi Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima sebesar 62,725. Angka indeks ini mengalami Penurunan yang cukup signifikan. Oleh karenanya perlu evaluasi kembali terkait kebijakan – kebijakan pada pemenuhan kualitas air, udara maupun tutupan hutan agar sesuai dengan target IKLH Nasional.

Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Daerah

Perekonomian daerah secara makro meskipun telah menunjukkan pertumbuhan positif setiap tahunnya, namun peningkatan nilai tambah hasil produksi usaha masyarakat belum memberikan peningkatan yang signifikan. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan semua sector pembangunan dan peran sector strategis akan sangat memberikan kontribusi yang tinggi dalam menggerakkan sektor lainnya. Untuk mendukung kemandirian perekonomian daerah ini maka perlu didukung oleh: 1).Peningkatan produksi unggulan dan

pengembangan industri kecil dan menengah.2). Penciptaan sentra ekonomi dan Pembangunan kawasan agribisnis.

Persentase Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut data BPS Kabupaten Bima. selama kurun waktu tahun 2014-2018. Nilai PDRB Kabupaten Bima terus mengalami peningkatan baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pada tahun 2016 PDRB ADHB. Kabupaten Bima mencapai Rp. 9,17 triliun, tahun 2018 mencapai Rp. 9,84 triliun dan pada tahun 2019 mencapai Rp. 11 triliun atau diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 10,60 % dari tahun 2018.

Kelautan dan Perikanan

Potensi sumber daya laut di Kabupaten Bima meliputi lahan budidaya seluas 6.814,9 Ha, terdiri dari budidaya perairan umum seluas 1.008 Ha (baru dimanfaatkan 0,01 Ha atau 0,001%) dan perairan payau/tambak seluas 5.748 Ha (baru dimanfaatkan 1.585,2 Ha atau 27%), perairan tawar seluas 58,90 Ha (baru dimanfaatkan 11,16 Ha atau 18,95%, dan serta perairan laut untuk perikanan tangkap seluas 322.904 Ha (sudah dimanfaatkan 284.704 Ha atau 88,17%). Sementara potensi areal pesisir mencakup pantai sepanjang ± 640 Km. Dengan potensi yang begitu besar, produksi ikan basah hasil tangkapan tahun 2018 di perairan laut dan ikan basah hasil budidaya di perairan umum rata-rata mencapai 58.537,6 ton dan untuk budidaya laut 159.895,6 ton.

KESIMPULAN

Sebagai bagian penutup dari hasil penelitian ini Pemerintah Kabupaten

Bima Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Bima telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 13 sasaran yang mencakup 35 indikator sasaran, diketahui bahwa 11 indikator sasaran atau 31,43 % Sangat Berhasil, 23 indikator sasaran atau 65,71 % Berhasil, 1 indikator sasaran atau 2,86 % cukup berhasil. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 110,87 % atau bermakna **Sangat Berhasil**. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bima pada tahun 2019 **Sangat Berhasil**. Namun, dengan catatan capaian kinerja yang sangat berhasil tersebut masih ada beberapa Indikator kinerja sasaran strategis yang menjadi catatan perbaikan kedepan antara lain :

1. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2019 masih rendah. Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Bima dihitung berdasarkan indikator indeks kualitas udara (bobot 30%), indeks kualitas air (bobot 30%) dan indeks tutupan hutan (bobot 40%). Dari hasil nilai IKLH Kabupaten Bima yang dihitung sebesar 58,623 maka dapat disimpulkan bahwa Nilai Indeks Kualitas Lingkungan hidup Kabupaten Bima masih dalam kategori kurang sehingga perlu disusun alternatif pengelolaan lingkungan agar terjadi peningkatan dan perbaikan pada kinerja pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima.

2. Tahun 2019 Ombudsman perwakilan NTB telah melakukan penelitian terhadap 9 organisasi perangkat daerah Kabupaten Bima yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat dan ternyata sebagian besar belum memiliki standar pelayanan seperti persyaratan pelayanan, jangka waktu, biaya, tarif, alur, mekanisme dan prosedur pelayanan atau masuk kategori zona kuning .

3. Untuk indeks desa membangun, Kabupate Bima masih perlu bekerja lebih keras lagi mengingat target Desa Maju sampai dengan tahun 2021 adalah 37 desa, capaian sampai dengan tahun 2019 baru 16 desa, dan pada tahun 2019 juga Kabupaten Bima mengirim duta kabupaten bima pada lomba desa tingkat propinsi yakni desa Monta Baru Kecamatan Lambu dan alhasil desa tersebut mendapat predikat juara 3 tingkat propinsi. Namun untuk kriteria desa berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya (Desa potensial menjadi Desa Maju), yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan, telah mencapai 90 Desa. Sedangkan Desa tertinggalnya adalah 88 desa. Dari 35 indikator sasaran yang diukur, untuk tahun 2019 ada 3 indikator sasaran strategis yang belum dilakukan penilaian adalah :

a) Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan

Daerah, karena belum ada rilis resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

b) Nilai / Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), karena belum ada rilis resmi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

c) Nilai / Peringkat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), karena belum ada rilis resmi dari Kementerian PAN RB Republik Indonesia;

DAFTAR PUSTAKA

Afkhani, M., Eisenberg, A., & Vaziri, H. (2003). *Leading to Choices: A Leadership Training Handbook for Women*. Syracuse: Syracuse University Press.

Bakken, L.L. (2005). Who Are Physician-Scientists' Role Models? Gender Makes a Difference. *Academic Medicine*, 80(5), 502-506.

Cain, J.M. et al. (2001). Effects of Perceptions and Mentorship on Pursuing a Career in Academic Medicine in Obstetrics and Gynecology. *Academic Medicine*, 76(6), 628-634.

Carr, P.L. et al. (2003). A Ton of Feathers: Gender Discrimination in Academic Medical Careers and how to Manage It. *Journal of Women's Health*, 12(10), 1009-1018.

Chesler, N.C. & Chesler, M. A. (2002). Gender-Informed Mentoring Strategies for Women Engineering Scholars: On Establishing a Caring Community. *Journal of*

- Engineering Education*, 91(1), 49-55.
- Choi, C.Q. (2004). Women Scientists Face Problems. *The Scientist*, 18(3).
- Danim, Sudarman (2004), "Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok", Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Hoare, J. and Gell, F. (2009). Women's Leadership and Participation: Overview. In Hoare, J. and Gell, F. (eds.), *Women's Leadership and Participation: Case Studies on Learning for Action* (pp. 1-17). Warwickshire: Practical Action Publishing Ltd in association with Oxfam GB.
- Ibrahim, Marwah Daud. (1991). *Perempuan Indonesia: Pemimpin Masa Depan? Mengapa Tidak*. Dalam Tan Melly G. *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan?* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Johnke, et all. (2000), *Organization Behavior Concept, Controversies, Applications*, PrenticeHall.Inc, Englewood Cliffs.
- Jónasdóttir, A.G. (1988). On the Concept of Interests, Women's Interests and the Limitation of Interest Theory. In K.B. Jones and A.G. Jónasdóttir (eds.), *The Political Interests of Gender*. London: Sage Publications.
- Khairuddin, 2000. *Pembangunan Masyarakat*. Liberty, Yogyakarta.
- Kartono, Kartini. (1983). *Pemimpin dan kepemimpinan: Apakah Pemimpin Abnormal itu?* Jakarta : CV. Rajawali.
- Moeleong, Lexy J. (1990). "Metode Penelitian Kualitatif", PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Niemeier, D.A. & González, C. (2004). Breaking into the Guildmasters' Club: What We Know About Women Science and Engineering Department Chairs at AAU Universities. *NWSA Journal*, 16(1), 157-171.
- Nugroho, R., (2006). *Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi kinerja karyawan (Studi Empiris pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Cabang Bandung)*, Tesis, Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Patton, Adri. (2005). *Peran Informal Leader Dalam Pembangunan Daerah di Daerah Perbatasan Kabupaten Malinau*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Parson, Wayne. (2005). *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Kencana. Jakarta.
- Rosser, S.V. & O'Neil Lane, E. (2002). Key Barriers for Academic Institutions Seeking to Retain Female Scientists and Engineers: Family-Unfriendly Policies, Low Numbers, Stereotypes, and harassment. *Journal of Women and Minorities in Science and Engineering*, 8, 161-189.
- Safi'i, Kencana Inu dkk, (1999). "Ilmu Administrasi Publik" PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*, UM-Press, Jakarta.
- Sugandi, supra, yogi. (2001) *Administarsi Publik, Konseo dan perkembangan ilmu di Indonesia*. Graha Ilmu Yogyakarta.
- Terry R. Goerge, (2005) "Dasar-Dasar Manajemen", Cetakan ke

sembilan, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Thoha, Miftah. (2010). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Dokumen -Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Perencanaan Pembangunan Nasional*.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah {LAKIP}Kabupaten Bima Tahun 2018